

PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI BKPH KEMLAGI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN MOJOKERTO TAHUN 2001-2007

Uut Kuswendi

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: uutkuswendi19@yahoo.co.id

Agus Trilaksana

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan di BKPH Kemlagi. Penelitian dilakukan dengan cara penelusuran arsip dan proses wawancara. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan program ini dengan memakai tumpangsari terhadap tanaman pertanian. Tumpangsari yang dilakukan menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat, namun masih belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan pesanggem. Program ini berhasil mengurangi tindakan pencurian kayu secara ilegal.

Kata kunci : hutan, pesanggem, tumpangsari

Abstract

This study aims to investigate the implementation of Forest Resources Management program at BKPH Kemlagi. The study was conducted by means of archive search and interview process. The results of the study describes the implementation of this program by using intercropping on agricultural crops. Intercropping conducted showed an increase in people's income, but still has not shown an increase in welfare pesanggem. The program succeeded in reducing illegal timber theft.

Keywords: forest, pesanggem, intercropping

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan¹. Menurut fungsinya hutan dibagi menjadi tiga jenis yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah². Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan³. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya⁴.

Hutan merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Pengelolaan hutan negara, untuk kemakmuran masyarakat dilaksanakan dalam mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain dapat berupa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) desa.

Peranan masyarakat sekitar hutan sebagai salah satu komponen sumber daya manusia. Manusia sebagai pelaku dari kegiatan pengelolaan alam memiliki peranan yang cukup besar untuk meningkatkan penggalian, pemanfaatan, dan pembinaan dalam arti mengembangkan produktifitas serta mempertahankan fungsi hutan. Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan bekerja sebagai petani pesanggem. *Pesanggem* adalah masyarakat desa sekitar hutan yang membantu pihak

¹. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 1 ayat 2.

². *Ibid.*, pasal 1 ayat 8.

³. *Ibid.*, pasal 1 ayat 7.

⁴. *Ibid.*, pasal 1 ayat 9.

perhutani mengelola lahan hutan⁵. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat memiliki keunggulan yaitu antara Perhutani dan Pesanggem sama-sama memiliki keuntungan atau simbiosis mutualisme. Pelaksanaan program PHBM dengan pembukaan lahan hutan serta menggunakan sistem tanam tumpangsari. Tumpangsari yang digalakkan di sekitar BKPH Kemlagi, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh *pesanggem* di bawah tegakan kayu jati dan kayu putih, namun sebagian besar adalah di bawah tegakan tanaman kayu putih.

METODE

Metode merupakan seperangkat aturan atau tata cara serta prosedur kerja dalam penelitian. Konteks yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah metode historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau⁶. Untuk memperoleh data penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu heuristik, pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang diperlukan sesuai dengan topik yang akan diteliti⁷. Pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data primer dan sekunder yang berhubungan dengan tema yang dikaji penulis, Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di BKPH Kemlagi Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto tahun 2001-2007. Sumber primer yang diperoleh adalah Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur No : 285/KPTS/II/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, data penghasilan masyarakat sekitar hutan, data pencurian kayu, data hasil pertanian palawija, dan wawancara dengan pelaku yang terdiri dari petugas perhutani dan para pesanggem sebagai petani yang ikut serta mengelola lahan hutan. Sumber sekunder/pendukung yang diperoleh adalah berupa buku-buku terbitan yang berkaitan dengan masalah kehutanan dan sistem tanam secara tumpangsari di wilayah hutan.

Langkah kedua adalah melakukan kritik, dalam tahap ini peneliti hanya melakukan kritik intern. Kritik intern merupakan pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta sejarah⁸. Fakta dari penelitian sejarah ini adalah meningkatnya pendapatan pesanggem dan menurunnya kasus pencurian kayu yang berada di BKPH Kemlagi. Pada langkah ini penulis melakukan pengujian terhadap validitas terhadap sumber-sumber yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan

Bersama Masyarakat di BKPH Kemlagi Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto tahun 2001-2007, sehingga akan diperoleh fakta sejarah mengenai pengelolaan hutan masyarakat terhadap pembangunan perekonomian dan keadaan sosial masyarakat desa sekitar hutan tahun 2001-2007.

Langkah ketiga adalah interpretasi. Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta.⁹ Pada tahap ini peneliti mencari keterkaitan antar berbagai fakta yang telah diperoleh kemudian menganalisis hasil dari penafsirannya. Penulis akan menentukan data yang relevan dengan melakukan pemilahan sumber yang sudah dilakukan kritik. Sumber tersebut yang berhubungan dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di BKPH Kemlagi Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto tahun 2001-2007. Fakta sejarah yang didapat melalui kritik akan dihubungkan untuk dijadikan bangunan penulisan, sehingga akan mampu menjawab semua rumusan masalah yang telah dibuat. Kegiatan ini berakhir dengan terjawabnya semua rumusan masalah yang kemudian dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Langkah terakhir Historiografi, merupakan penulisan masa lampau berdasarkan fakta yang telah ditafsirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar¹⁰. Penulisan dilakukan secara kronologis sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kebenaran suatu sejarah dengan tata bahasa Indonesia yang baku dengan sistematika penulisan di bawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Latar Diberlakukannya Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Kepemimpinan presiden Soeharto pada masa Orde Baru, memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan undang-undang Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing tersebut tidak semata-mata diberikan begitu saja, melainkan dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan agar mampu menarik Investor. Masa ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun, bersamaan dengan itu ketimpangan sosial mulai muncul di dalam masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat yang tidak mendapat manfaat sama sekali dan merasa dirugikan. Kesenjangan sosial di dalam masyarakat semakin terasa memuncak akibat adanya korupsi. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses termarjinalisasi.

Keadaan diperparah dengan adanya kepemimpinan presiden Soeharto yang terlalu otoriter.

⁵ Desak Made Oka Purnawati. 2004. *Hutan Jati Madiun*

Silvikultur di Karesidenan Madiun 1830-1913. Semarang: Intra Pustaka Utama, hlm 78

⁶ Louis Gotschak, 1986, *Mengerti Sejarah: Edisi Terjemahan*, Jakarta: UI Press, hlm 32.

⁷ Kasdi, Aminuddin. 2005, *Memahami Sejarah*, Surabaya: Unesa University Press, hlm 10.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm 11.

¹⁰ *Ibid.*

Kepemimpinan tersebut membuat masyarakat hidup dalam tekanan. Tekanan terjadi karena kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Selain itu setiap kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat bisa berakibat sangat fatal. Akibat tersebut adalah panculikan disertai dengan pembunuhan kepada sang pelaku kesalahan. Keadaan demikian berlaku juga terhadap bidang kehutanan, masyarakat adat tidak memiliki hak atas hutan, karena hutan dianggap sebagai kekayaan negara. Keadaan demikian membuat perekonomian masyarakat adat maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan semakin terpuruk.

Kekuasaan Orde Baru berlangsung lebih dari tiga dasa warsa yang bersifat *sentralistik* atau terpusat di P. Jawa saja. Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Adanya krisis ini mengakibatkan kondisi ekonomi Indonesia secara perlahan memburuk seiring dengan krisis. Keadaan perekonomian yang memburuk, diperparah dengan maraknya KKN yang semakin merajalela. Tindakan KKN yang terjadi pada para penguasa memberikan kekayaan yang melimpah, sementara masyarakat semakin miskin. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok tersebut, mendorong munculnya kerusuhan sosial di berbagai wilayah. Selain itu muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa, yang menuntut lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan.

Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Soeharto mengawali Indonesia menuju Orde Reformasi. Era Reformasi memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers.

Kebebasan yang demikian mengakibatkan masyarakat mulai mengadakan perlawanan. Perlawanan juga dilakukan oleh masyarakat adat maupun masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Perlawanan tersebut dilakukan dengan aksi penjarahan kekayaan sumberdaya alam berupa hutan. Hal tersebut dikarenakan pada era sebelumnya masyarakat tidak leluasa bahkan tidak diberikan hak atas hutan, yang sebelumnya mereka olah.

Aksi penjarahan hutan kian hari semakin meningkat intensitasnya. Hal ini dikarenakan penumpahan rasa kekecewaan akan kebijakan penguasa sebelumnya. Aksi ini berlangsung cukup lama dan diperparah dengan adanya *statement* dari presiden K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berisi :

Ada tiga macam sumber alam, itu harus direbut kembali, dipakai untuk memakmurkan Bangsa kita...Satu, sumber hutan; kedua, sumber pertambangan dalam negeri; tiga, sumber kekayaan laut.

Statement tersebut terus memicu terjadinya penjarahan hutan, penjarahan di KPH Mojokerto dapat diketahui dari hasil wawancara dengan pihak Perhutani KPH Mojokerto, sebagai berikut

“Pada masa pemerintahan Gus Dur, waktu itu saya masih menjadi asper (Asisten Perhutani) di Kemlagi. Banyak terjadi penjarahan, bahkan kantor saya dikepung masa dan saya berada didalam. Aparat keamanan tidak berani bertindak karena kekuatan masa yang jauh lebih besar”¹¹.

Hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa masyarakat sangat marah akan kebijakan pada masa sebelumnya yang tidak memberikan kebebasan akan kepemilikan kekayaan sumberdaya alam berupa hutan. Saat pemerintahan berganti dengan didukung adanya kebebasan dalam menyampaikan pendapat mendorong masyarakat untuk melampiaskan kekecewaan terhadap pemerintahan yang baru. Kemarahan masyarakat yang memuncak mengakibatkan ketidakberdayaan pihak perhutani dan juga aparat keamanan.

Penjarahan yang berlarut-larut mengakibatkan hutan mengalami degradasi. Degradasi adalah Sebuah proses yang diakibatkan oleh ulah manusia atau alam yang berdampak negatif terhadap kapasitas lahan untuk dapat berfungsi secara efektif di dalam suatu ekosistem dengan menerima, menyimpan dan mendaur ulang air, energi dan unsur hara¹². Untuk memperbaiki hutan yang mengalami degradasi tersebut, maka pemerintah melalui perhutani mulai mengadakan perbaikan hutan. Perbaikan tersebut adalah Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

b. Pengaruh program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Bidang Ekonomi

Hutan yang mengalami degradasi akibat penjarahan pada awal Orde Reformasi, mendorong pihak pemerintah untuk mempertahankan kawasan agar terhindar dari kerusakan yang lebih parah lagi. Usaha yang dilakukan pemerintah dengan penggalakan program PHBM pada tahun 2001. Program PHBM mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan setelah orde reformasi. Era reformasi dan terjadinya krisis moneter berdampak pada perekonomian Bangsa Indonesia. Krisis moneter yang melanda Bangsa Indonesia mengakibatkan perekonomian menjadi lemah. Perekonomian yang lemah tersebut mendorong masyarakat untuk mencari cara agar tetap bisa bertahan hidup. Kegiatan yang dilakukan oleh petani untuk mempertahankan hidupnya dengan cara merambah hutan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kebutuhan masyarakat di daerah kawasan hutan lebih menekankan pada sektor pangan.

¹¹ . Bapak Gatot Subianto (KPH Mojokerto staf SP Lingkungan). Tanggal 4 Juni 2013. Jam 11.30. KPH Mojokerto

¹² . Nawir, Ani Adwinata. 2008. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa*. Bogor : Center for International Forestry Research (CIFOR). Hlm. xxxv

Terlibatnya masyarakat dalam membantu meningkatkan pangan nasional secara nyata oleh para pesanggem dengan sistem tanam tumpangsari. Tumpangsari bertujuan untuk meningkatkan penghasilan petani, dengan penanaman beberapa jenis tanaman dalam waktu yang sama dan di tempat yang sama. Penanaman secara tumpangsari dengan andil yang sempit diharapkan dapat dihasilkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama satu tahun. Hasil percobaan tersebut dipakai sebagai dasar oleh Direksi Perum Perhutani untuk menetapkan kebijakan Nasional. Sejak saat itu dikeluarkan Inmas Tumpangsari untuk dilaksanakan oleh KPH lain¹³.

Peluang yang cukup potensial dalam peningkatan produksi pangan, khususnya di Jawa, adalah dengan melaksanakan *agroforestry* atau wana tani. Pelaksanaan pola ini, petani dapat memanfaatkan lahan hutan milik Perhutani untuk budi daya tanaman pangan. Penanaman dilakukan oleh para pesanggem di antara larikan tegakan tanaman pokok yang umurnya masih muda. Model penanaman ini berkaitan dengan tanaman hutan yang memiliki ukuran relatif kecil. Wana tani jenis tanaman pangan di BKPH Mojokerto diberdayakan dibawah tegakan kayu putih. Sedangkan pada tegakan kayu jati penanaman pangan dapat dilakukan apabila umur tegakan masih muda.

Wana tani (*agroforestry*) memberi manfaat baik bagi petani sekitar hutan maupun Perhutani. Menurut King dan Chandler Wana tani adalah sistem pengelolaan lahan yang berasaskan kelestarian, meningkatkan hasil lahan secara keseluruhan, mengombinasikan produksi tanaman pertanian dengan tanaman hutan atau hewan secara bersamaan atau berurutan pada unit lahan yang sama, dan menerapkan cara-cara pengelolaan sesuai dengan kebudayaan masyarakat setempat¹⁴. Manfaat yang didapatkan oleh petani yaitu memperoleh tambahan pendapatan dengan mengerjakan lahan pertanian di kawasan hutan dan bertambahnya hasil panen sebagai persediaan pangan. Dikatakan tambahan karena sebagian besar petani tersebut juga mengerjakan lahan pertanian desa.

Pelaksanaan tumpangsari yang dilakukan oleh pesanggem pada lahan hutan dapat memanen berkali-kali, hasil panen ini secara umum dapat meningkatkan penghasilan masyarakat. peningkatan hasil panen belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka, hal tersebut dikarenakan biaya produksi yang cukup besar dengan penghasilan yang kurang menjanjikan. Perbandingan biaya produksi dan pendapatan masyarakat, dalam kegiatan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

Biaya Produksi Pertanian Tahun 2007

Jenis tanaman	Bibit Rp @ kg	Pupuk @ karung	Upah Pekerja	Konsumsi	Hasil @ karung(50kg)
Padi (5)	15.000	40.000	200.000	80.000	5 x 100.000
Jagung P.11	20.000	40.000	60.000	15.000	2 x 80.000
Cabai	-	40.000	60.000	15.000	2 x 100.000

Hasil wawancara¹⁵

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penanaman padi membutuhkan biaya sebesar Rp. 335.000,00 dengan penghasilan bapak cukup mencapai Rp. 500.000,00. Tanaman jagung dengan biaya sebesar Rp. 135.000,00 penghasilan Rp. 160.000,00. Penanaman cabai dengan biaya sebesar Rp. 115.000,00 menghasilkan Rp.200.000,00. Total biaya produksi tersebut mencapai Rp. 585.000,00 menghasilkan Rp. 860.000,00. Hasil tersebut ternyata masih kurang maksimal karena biaya pengeluaran yang di hitung belum termasuk tenaga keseharian dari pesanggem. Selain itu naik turunnya harga jual hasil pertanian tidak stabil, apabila harga naik maka keuntungan bisa lebih besar, namun apabila harga jual turun maka pesanggem bisa mendapatkan kerugian.

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan PHBM dengan sistem tanam tumpangsari secara umum mampu meningkatkan pendapatan pesanggem, namun pendapatan tersebut masih belum mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pekerjaan petani sekitar kawasan hutan tidak hanya di bidang pertanian, beberapa lapangan pekerjaan tercipta dengan adanya program PHBM ini. Lapangan pekerjaan yang tersedia dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹³ Simon, Hasanu. 2004. *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. hlm 106-107

¹⁴ . Indriyanto. *Ibid.*, hlm 146

¹⁵ . Hasil wawancara dengan narasumber : Bapak Cukup (Petani Pesanggem). Tanggal 06 November 2013. Jam 19.00. dsn. Geneng

Penyerapan Tenaga Kerja Kegiatan PHBM di BKPH Kemlagi

No	Jenis kegiatan	Jumlah tenaga kerja
I	Bidang pembinaan hutan	
1	Persemaian	
	Pengumpulan benih	130
	Persiapan lapangan	50
	Penyapihan pemeliharaan persemaian	80
2	Tanaman	
	Persiapan tanaman	122
	Angkut bibit	30
	Penanaman	193
	Pesanggem	-
3	Pemeliharaan tanaman tahun II, III, IV, dan V	
	Babat dangir	480
	Angkut dan tanam bibit	305
	Gebrus	173
II	Bidang produksi	
	Tenaga non kayu	
	Pemetik daun kayu putih	268
	Pikul daun kayu putih	161
III	Bidang keamanan	
	Angkut / pikul kayu	45
	Muat bongkar kayu	41
	Jumlah tenaga kerja	2088

Sumber data: Data SISDH KPH Mojokerto¹⁶

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan PHBM menciptakan atau memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Pekerjaan yang didapatkan oleh masyarakat sekitar hutan terbagi kedalam tiga bidang yang cukup signifikan yaitu bidang pembinaan hutan, bidang produksi, dan keamanan hutan. Dalam bidang pembinaan hutan pekerjaan terbagi kedalam tiga kategori dengan jumlah pekerjanya. Persemaian meliputi kegiatan pengumpulan benih sejumlah 130 orang, persiapan lapangan sejumlah 50 orang, dan penyapihan pemeliharaan persemaian sejumlah 80 orang; tanaman meliputi kegiatan persiapan tanaman sejumlah 122 orang, angkut bibit sejumlah 30 orang, dan penanaman sejumlah 193 orang; serta pemeliharaan tanaman yang meliputi kegiatan babat dangir sejumlah 480 orang, angkut dan tanam bibit sejumlah 305 orang, dan gebrus sejumlah 173 orang. Sedangkan produksi hanya bidang non kayu yang

pekerjaannya adalah pemetik daun kayu putih dengan jumlah pekerja 268 orang dan memikul daun kayu putih hasil panen dengan jumlah pekerja 161 orang. Serta bidang keamanan hutan yang terdiri dari kegiatan angkut / pikul kayu sejumlah 45 orang dan muat bongkar kayu sejumlah 41 orang. Total jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan kehutanan pada program PHBM sebanyak 2.088 orang.

Jumlah pekerja yang mencapai 2.088 orang, merupakan harapan dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan banyaknya macam pekerjaan yang ada ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan pekerjaan yang ada tidak dilakukan sepanjang tahun. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan musim tanaman itu sendiri. Selain itu orang yang bekerja tidak banyak berubah, hal tersebut di dorong perbedaan waktu kerja. Setiap orang bisa melakukan pekerjaan yang berbeda dalam waktu yang berbeda. Perbedaan musim tanaman akan sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh petani hutan tersebut. Hal tersebut memungkinkan jumlah pekerja tidak sebanyak data, tetapi setiap pekerjaan yang dilakukan memang membutuhkan jumlah tenaga yang cukup banyak.

c. Dampak Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Dalam Bidang Keamanan Hutan

Program PHBM sangat tepat dalam melakukan tugas pengawasan. Dikatakan demikian karena dengan hutan Negara yang dimiliki oleh rakyat secara langsung akan mendapatkan pengawasan yang sangat ketat. Pengawasan tersebut sangat efisien karena lahan hutan atau persil telah diawasi oleh pengelola pertanian yang berada di bawah tegakan tanaman hutan. Hal tersebut dilakukan oleh pemilik baik dibawah tegakan kayu putih ataupun kayu jati. Pengawasan yang dilakukan memberikan keamanan, kelestarian, dan kelangsungan bagi generasi penerus yang akan datang tidak akan mengalami kerusakan.

Sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPH kepada masyarakat kawasan hutan diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan masyarakat yang digunakan dalam membantu Perhutani melestarikan hutan. Sosialisasi tersebut berisi cara penanaman serta perawatan tanaman yang baik. Perihal penanaman yang baik tentunya disertai larangan dan kewajiban agar dapat melestarikan kawasan hutan. Mereka yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi. Sanksi, merupakan sistem ganjaran (reward) dan sistem hukuman (punishment) dalam suatu sistem sosial¹⁷. Reward yang diberikan berupa hadiah agar menambah semangat untuk bekerja lebih baik, sedangkan punishment berupa pengambilalihan lahan hutan yang sudah dikerjakannya.

Aturan ditegakkan pada pengelolaan lahan andil di BKPH kemlagi. Aturan berisi kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh semua pihak. Berikut ini adalah

¹⁶. Arsip Laporan Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemlagi, Mojokerto, tahun 2005

¹⁷. Munadar. *Op Cit.*, hlm. 61

beberapa larangan yang harus diperhatikan oleh pesanggem.

“Sosialisasi diadakan berkenaan dengan cara menanam, merawat, dan menghindari pemakaian bahan yang dilarang agar hutan lestari. Hal yang paling penting adalah kesadaran dan kerjasama oleh masyarakat. keramah tamahan ditunjukkan kepada masyarakat dengan pengecualian penanaman tanaman yang dilarang, namun dibolehkan jika ditanam di pal batas. Pengambilalihan lahan hutan tidak dilaksanakan meskipun pesanggem ada yang melanggar, seperti pemakaian pupuk serta pestisida. Pemberian reward hewan ternak, jam dinding, dan pemberian bibit gratis atas prestasi seorang pesanggem juga diharapkan mampu memberikan dorongan motivasi kepada pesanggem lain. Larangan yang rentan dan sulit pengontrolannya yaitu pengalihan lahan hutan¹⁸”.

Hasil wawancara tersebut menggambarkan adanya peraturan dalam mengelola lahan hutan. Aturan yang dibuat meliputi kewajiban dan larangan. Larangan tersebut adalah tidak boleh memakai bahan pupuk kimia, pembuangan sampah plastik sisa bungkus bibit tanaman, penggunaan pestisida, dan penggunaan traktor, serta penanaman pohon besar selain tegakan. Pemakaian pupuk kimia tidak dianjurkan karena unsur yang terkandung dalam pupuk tersebut dapat membuat unsur tanah menjadi keras. Dianjurkan bagi para pesanggem untuk memakai pupuk kandang atau kompos yang terbuat dari bahan rontokan daun. Pembuangan sampah plastik dari sisa bungkus bibit akan menjadikan tanah rusak akibat dari plastik yang tidak bisa menyatu dengan tanah. Pemakaian pestisida juga akan mengganggu pertumbuhan tegakan, walaupun bisa mengurangi serangan hama dan gulma. Pemakaian traktor juga dilarang karena galian yang dalam akan mengganggu pertumbuhan akar. Akar yang terganggu juga mempengaruhi penyimpanan air yang terserap pada musim hujan, sehingga jika akar tidak bekerja secara maksimal, maka pada musim kemarau akan terjadi kekeringan. Begitu juga dengan penanaman pohon besar akan menghambat pertumbuhan tanaman pokok yaitu kayu jati dan kayu putih, dan akar yang besar pula banyak menyerap zat hara yang seharusnya dibutuhkan oleh tegakan.

Pemberian hadiah kepada pesanggem yang berprestasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Pesanggem yang berprestasi dapat dilihat dari pelaksanaan peraturan yang berlaku, serta tanaman yang diolahnya berhasil dengan hasil yang baik karena pengelolaan terstruktur. Hadiah yang diberikan oleh pihak perhutani akan keberhasilan pesanggem tersebut berupa pemberian hewan ternak, jam dinding, dan pemberian bibit gratis agar menjadi pemicu terus meningkatkan kinerjanya. Hadiah ini diharapkan menjadi contoh serta dapat menarik perhatian bagi pesanggem lainnya.

Pelaksanaan PHBM yang bertujuan untuk mengelola lahan hutan dengan dasar kesejahteraan

¹⁸. Gatot. *Op Cit.*

masyarakat sekitar hutan juga memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat terjaga dengan adanya keamanan hutan, dari tindakan pencurian hasil hutan. Untuk menghindari pencurian maka pihak Perhutani dengan masyarakat bekerjasama. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

“Kerjasama masyarakat juga membantu terciptanya keamanan hutan, dengan wilayah yang luas dan tenaga yang terbatas dan mampu menghindari konflik atau kekerasan¹⁹”.

Kebijakan PHBM ini sangat membantu keamanan wilayah hutan dari pembalakan liar. Masyarakat yang berpartisipasi sebagai pesanggem untuk memanfaatkan lahan hutan mempunyai peran penting dalam menjaga hutan. Peran tersebut karena pengawasan terhadap tegakan pada lahan garapannya sendiri, sehingga keamanan hutan dari pembalakan lebih intensif. Pengawasan masyarakat sebenarnya dilakukan secara tidak sadar, karena pesanggem hanya merawat dan mengawasi setiap tegakan yang ada pada lahan andilnya. Namun dengan sebagian besar lahan hutan dikerjakan oleh pesanggem maka hampir seluruh kawasan hutan terjaga dengan sendirinya. Berikut tabel pencurian kayu yang terjadi di BKPH Kemlagi selama tahun 2006-2007:

Pencurian Kayu Tahun 2006-2007

BKPH/ RPH	Tahun 2006			Tahun 2007		
	Jml Ha	Jml tggk	Jumlah kerugian	Jml Ha	Jml tggk	Jumlah kerugian
Simo	13	55	15.178.000	9	11	1.298.800
Kemlagi	8	25	1.926.000	13	13	4.672.000
Kupang	2	8	1.760.000	2	2	1.254.000
Selogen Dogo	-	-	-	-	-	-
Jumlah	23	88	18.864.000	24	26	7.224.800

Sumber data: Rekapitulasi pencurian pada tahun 2007²⁰

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pencurian yang tertinggi di wilayah BKPH kemlagi tahun 2006 adalah di RPH Simo dengan jumlah tegakan sebanyak 55. Dengan adanya pencurian tegakan tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian yang paling besar yaitu sebesar Rp 16.476.800,00. Pada tahun 2007 di RPH Simo masih terjadi kasus pencurian, namun tingkat pencurian menurun cukup drastis dari 55 tegakan menjadi 11 tegakan, dengan kerugian Rp 1.298.800,00.

Daerah yang cukup aman dari kasus pencurian kayu adalah RPH Kupang. Tabel tersebut menggambarkan kasus pencurian pada tahun 2006 hanya 8 tegakan dan 2007 sejumlah 2 tegakan. Kerugian masing – masing adalah Rp 1.760.000,00 dan Rp 1.254.000,00. Kasus pencurian kayu di RPH Kupang tentunya paling sedikit jika dibandingkan dengan RPH Simo yang mengalami pencurian paling banyak dan RPH Kemlagi pada urutan kedua. Sedangkan luas wilayah RPH

¹⁹. *Ibid.*

²⁰. Arsip Laporan Pencurian Kayu Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemlagi, Mojokerto, tahun 2007

Selogendogo belum diketahui dengan pasti begitu juga dengan pencurian kayunya.

Total pencurian yang terjadi selama 2 tahun adalah 114 tegakan. Pencurian yang begitu banyak, mengakibatkan kerugian yang cukup besar yaitu Rp 26.088.800,00. Melihat jumlah tegakan yang dicuri dan harga yang jauh berbeda, dikarenakan jenis kayu yang dicuri berbeda. Perbedaan harga ditentukan oleh kualitas kayu itu sendiri. Kayu jati yang paling mahal jika dibandingkan dengan kayu yang lain seperti sonokeling atau mahoni. Hal tersebut karena kepercayaan konsumen terhadap kualitas kayu jati yang memiliki karakteristik yang kuat, jika dibandingkan dengan jenis kayu yang lain.

Banyaknya kasus pencurian kayu tersebut, tentu akan banyak mengakibatkan kerugian bagi negara, khususnya wilayah BKPH Kemlagi. Dari tabel tersebut juga didapatkan gambaran bahwa adanya penurunan aktivitas pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Penurunan tersebut sebagai salah satu dampak positif dari pelaksanaan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Selain program tersebut untuk mananggulangi kasus pencurian kayu yang terjadi, keamanan hutan harus ditingkatkan. Keamanan hutan tidak hanya tugas dari petugas keamanan atau polisi hutan saja. Masyarakat sekitar kawasan hutan harus memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan yang berada di sekitar pemukiman mereka. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan yang lestari, serta besarnya manfaat hutan bagi mereka turut mendorong terciptanya keamanan hutan setelah reformasi.

Masyarakat yang dimaksud di atas adalah petani pesanggem. Pesanggem juga sangat berpengaruh terhadap penurunan jumlah kasus pencurian kayu. Adanya pengawasan pesanggem terhadap lahan hutan yang dikerjakannya, sehingga keamanan hutan lebih terjaga keamanannya. Bantuan yang diberikan oleh pesanggem tersebut turut serta meningkatkan petugas keamanan atau polisi hutan melakukan penangkapan pencuri serta hasil pencurian kayu yang dilakukan oleh pembalok liar. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan banyaknya kayu yang diamankan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kerugian dan Jumlah Kayu yang Dapat Diamankan Pada Tahun 2006

BKPH/RPH	Tahun 2006			Kayu yang diamankan		
	Jumlah Ha	Jumlah tegakan	Jumlah kerugian	Batang	M3	Rp
Simo	1	2	678.000	10	0,952	460.790
Kemlagi	3	4	630.000	-	-	-

Kupang	2	2	1.254.000	-	-	1.254.000
Selogendogo	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	6	8	2.562.000	10	-	1.714.790

Sumber : laporan BKPH Kemlagi ke KPH Mojokerto Tahun 2006²¹

Dari tabel pengamanan kayu di atas, didapatkan gambaran bahwa terjadi pencurian kayu sebanyak 8 tegakan. Pencurian tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.562.000,00 dan berhasil mengamankan kayu sebanyak 10 batang dan 2 tegakan. Pengamanan yang dilakukan mencegah kerugian yang lebih besar. Kerugian yang diderita sebanyak Rp 2.562.000,00 tersebut dapat ditekan dengan pengamanan sehingga dapat memangkas kerugian sebesar Rp 1.714.790,00.

Dengan demikian, meskipun telah dilaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di BKPH Kemlagi, yang secara ekonomi telah mampu membantu menambah tingkat penghasilan petani di sekitar hutan, namun juga masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan. Permasalahan tersebut yang paling krusial adalah penegakan hukum berkaitan dengan tindakan pencurian kayu, yang sering melibatkan masyarakat petani hutan. Masyarakat petani hutan juga telah banyak membantu menjaganya, sehingga terjadi simbiosis mutualisme

PENUTUP

Pelaksanaan PHBM di kawasan BKPH Kemlagi melibatkan unsur masyarakat yaitu petani. Program PHBM memberikan keuntungan bagi kedua pihak yaitu pesanggem dan pihak perhutani. Keuntungan yang diperoleh pesanggem secara umum dalam mengerjakan lahan hutan adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Kegiatan pertanian diharapkan mampu membantu meningkatkan hasil tanaman pangan pokok pesanggem.

Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh pesanggem adalah dengan cara sistem tanam tumpangsari. Peggunaan sistem ini diharapkan memberikan keuntungan ganda. Keuntungan didapat dari kegiatan bercocok tanam yang lebih dari satu kali dalam satu tahun, penanaman tanaman yang lebih dari satu jenis pada lahan dan waktu yang bersamaan, serta adanya penanaman tanaman pada pal batas (*wangkit*).

Hasil sharing yang dilakukan antara pihak Perhutani dengan pesanggem juga turut serta membantu meningkatkan pendapatan pesanggem. Hasil sharing berupa cabang kayu yang terlalu rindang sehingga dianggap mengganggu hasil kegiatan bertani bisa dipangkas untuk diambil kayunya. Selain itu adanya

²¹ . Arsip Laporan kerugian Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemlagi, Mojokerto, tahun 2006

rencok setelah pemanenan yang dilakukan pihak perhutani.

Program PHBM yang diberlakukan oleh Perhutani turut serta memberikan keuntungan bagi pemerintah. Keuntungannya adalah mendorong naiknya tingkat keamanan hutan dan menurunnya kegiatan pencurian kayu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut didorong oleh adanya partisipasi pesanggem yang selalu menjaga tegakan pada petak yang diolahnya. Selain itu adanya kegiatan patroli oleh polisi hutan yang dibantu oleh pesanggem. Selain dari keamanan hutan, kegiatan bertani yang dilakukan oleh pesanggem turut serta membantu ketersediaan pangan nasional walaupun tidak terlalu signifikan.

Daftar Pustaka

Sumber Arsip

Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor : 285/KPTS/II/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto. 2010

Arsip Laporan Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemlagi, Mojokerto, tahun 2005

Arsip Laporan Pencurian Kayu Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemlagi, Mojokerto, tahun 2007

Arsip Laporan Kerugian Sub Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Kemlagi, Mojokerto, tahun 2006

Laporan Triwulan tahun 2013 perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Sumber Buku dan Majalah

Aminuddin Kasdi. 2007. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press

Adiwilaga. Anwar. 1982. *Ilmu Usaha Tani*. Bandung : Alumni

H.M. Soenardjo, Hardjodarsono. 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia II*. Jakarta: Depatemen Kehutanan

M. Munandar Soelaeman. 1986. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama

Gotschak Louis. 1986. *Mengerti Sejarah: Edisi Terjemahan*. Jakarta: UI Press

Indriyanto. 2010. *Pengantar budi daya hutan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Moh. Arsjad Anwar, dkk. 1986. *Ekonomi Indonesia masalah dan prospek 1986/1987*. Jakarta: UI Press

Nawir, Ani Adiwinata. 2008. *Rehabilitasi Hutan di Indonesia: Akan Kemanakah Arahnya Setelah Lebih Dari Tiga Dasawarsa*. Bogor : Center for International Forestry Research (CIFOR)

Purwati, Desak Made Oka. 2004. *Hutan Jati Madiun silvikultur di Karesidenan Madiun 1830-1913*. Semarang Timur: Intra Pustaka Utama

Simon Hasanu. 2004. *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wawancara

Bapak Cukup (Petani Pesanggem). Tanggal 06 November 2013. Jam 19.00. dsn. Geneng

Bapak Gatot Subianto (KPH Mojokerto staf SP Lingkungan). Tanggal 4 Juni 2013. Jam 11.30. KPH Mojokerto